

IMPLEMENTASI APLIKASI SAKTI DAN SPAN DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Ahmad Inzil Anwar, Miftahul Hadi
PKN STAN
inzil2607@gmail.com, miftahulhadi@pknstan.ac.id

Abstract

This study aims to determine how the application of SAKTI and SPAN applications in the preparation of financial statements at the KPPN Pontianak. This study uses a qualitative method. Data and information obtained in the form of primary data and secondary data. The data that has been obtained is then processed to produce a conclusion that the application of SAKTI and SPAN in the preparation of financial reports, the General Ledger and Reporting Module (GLP) business processes, and the division of user roles in the operation of SAKTI and SPAN are in accordance with applicable theories, regulations, and provisions. In the process of preparing financial reports, there are obstacles faced by users in operating SAKTI and SPAN, including the system experiencing lagging, the SAKTI application under maintenance.

Keywords: Akuntansi Pemerintah, SAKTI, SIA Pemerintah, SPAN,

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan aplikasi SAKTI dan SPAN dalam penyusunan laporan keuangan pada KPPN Pontianak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data dan informasi yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Data yang telah diperoleh kemudian diolah untuk menghasilkan kesimpulan bahwa penerapan SAKTI dan SPAN dalam penyusunan laporan keuangan, proses bisnis dalam modul General Ledger and Reporting (GLP), dan pembagian peran pengguna dalam pengoperasian SAKTI dan SPAN sesuai dengan teori, peraturan, dan ketentuan yang berlaku. Dalam proses penyusunan laporan keuangan, terdapat kendala yang dihadapi pengguna dalam mengoperasikan SAKTI dan SPAN, antara lain sistem mengalami lagging, aplikasi SAKTI dalam masa pemeliharaan.

Kata Kunci: Akuntansi Pemerintah, SAKTI, SIA Pemerintah, SPAN

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus disertai pemanfaatannya pada berbagai bidang kehidupan agar tidak tergerus oleh perkembangan zaman, begitu juga di lingkungan pemerintah. Penerapan atau implementasi teknologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (*e-government*) dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan kepada masyarakat. Hal ini sejalan dengan apa yang dituangkan dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan *E-Government* yang satu di antaranya yaitu melalui pemanfaatan sistem informasi akuntansi (Inpres, 2003).

Implementasi sistem teknologi informasi akuntansi yang baik pada sektor pemerintah akan menambah nilai suatu organisasi yaitu melalui

meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan kepada pengguna serta tersedianya pengendalian internal yang memadai dalam rangka pengambilan keputusan yang lebih baik. Dalam rangka mewujudkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003, pelaksanaan proses transformasi *e-government* di bidang keuangan negara oleh pemerintah Indonesia ditandai dengan adanya perkembangan reformasi manajemen keuangan pemerintah (Inpres, 2003).

Reformasi manajemen keuangan pemerintah di Indonesia diawali dengan terbitnya paket undang-undang di bidang keuangan negara, yang kemudian ditindaklanjuti dengan adanya *Government Financial Management and Revenue Administration Project (GFMRAP)*. GFMRAP meliputi 4 bidang besar, yaitu manajemen keuangan publik, administrasi pendapatan, tata kelola dan akuntabilitas, dan tata kelola proyek dan implementasi. Di beberapa negara termasuk Indonesia telah

mengembangkan pengelolaan keuangan negara yang modern melalui penerapan IFMIS (*Integrated Financial Management Information System*). Dener, dkk (2017, dikutip dalam Sudarto, 2019) menyatakan IFMIS merupakan serangkaian otomasi solusi terintegrasi yang memungkinkan pemerintah untuk merencanakan, mengeksekusi, dan memonitor anggaran, dengan membantu dalam prioritas, eksekusi dan pelaporan pengeluaran, serta mengawal dan melaporkan pendapatan.

Modernisasi anggaran dan perbendaharaan yang menjadi bagian dari GFMRAP merupakan salah satu upaya dalam melakukan pengelolaan atau manajemen keuangan pemerintah. Modernisasi anggaran dan perbendaharaan diwujudkan dalam bentuk implementasi Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang kemudian dikenal dengan SPAN. SPAN diterapkan pada *level* Bendahara Umum Negara (BUN) dan Kuasa BUN yang mengintegrasikan seluruh basis data dan aplikasi terkait pengelolaan

keuangan negara serta sekaligus berperan sebagai pendukung penerapan akuntansi berbasis akrual untuk keuangan pemerintah.

Kebutuhan akan sistem teknologi informasi pada sisi BUN terpenuhi dengan adanya SPAN, tetapi SPAN tidak memungkinkan untuk diterapkan atau digunakan oleh Kementerian Negara/ Lembaga (K/L). Sistem informasi atau aplikasi di sisi K/L sebelumnya menggunakan aplikasi *existing* yang bersifat *stand-alone* dan terdiri dari beberapa aplikasi, sehingga dibentuklah Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi yang kemudian dikenal dengan SAKTI. Aplikasi SAKTI terintegrasi dengan aplikasi SPAN pada setiap tahapan prosesnya.

SAKTI merupakan aplikasi yang digunakan sebagai sarana bagi satuan kerja (satker) dalam mendukung implementasi SPAN (DJPB, 2022b). SAKTI melakukan pengelolaan keuangan yang meliputi tahapan perencanaan sampai dengan pertanggungjawaban anggaran. SAKTI

mengintegrasikan seluruh aplikasi Satker dan mempunyai fungsi utama perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran (DJPB, 2020).

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai instansi yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan melaksanakan dua fungsi seperti halnya Kementerian Keuangan, yaitu sebagai Satuan Kerja (Satker) dan Kuasa BUN. Adanya dua fungsi yang dilaksanakan oleh KPPN mengakibatkan adanya pemisahan tugas dan fungsi berupa pembagian dalam melaksanakan fungsi sebagai Satker dan Kuasa BUN agar pengendalian internal tetap memadai. Oleh karena itu, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya KPPN menggunakan dua sistem aplikasi yaitu SAKTI pada *level* Satker dan SPAN pada *level* Kuasa BUN.

Penggunaan SAKTI dan SPAN menjadi suatu keharusan bagi KPPN karena dua fungsi yang dilaksanakan oleh KPPN. Pada akhir periode KPPN

akan membuat laporan keuangan, yaitu laporan keuangan Satker dan laporan keuangan BUN. KPPN menghasilkan laporan keuangan Satker melalui sistem aplikasi SAKTI dan laporan keuangan BUN melalui sistem aplikasi SPAN. Penyusunan laporan keuangan tersebut memanfaatkan penggunaan Modul General Ledger dan Pelaporan (GLP) pada masing-masing sistem aplikasi SAKTI dan SPAN. Penelitian ini bertujuan melakukan review implementasi atau penerapan sistem aplikasi SAKTI dan SPAN dalam penyusunan laporan keuangan di KPPN Pontianak serta kendala yang dihadapi KPPN Pontianak dalam penyusunan laporan keuangan melalui sistem aplikasi SAKTI dan SPAN.

LANDASAN TEORI

Sistem Informasi Akuntansi

Sistem informasi akuntansi (SIA) merupakan suatu sistem yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan

(Romney & Steinbart, 2016). Sedangkan menurut Bodnar dan Hopwood (2010), Sistem Informasi Akuntansi merupakan kumpulan dari peralatan dan manusia (sumber daya) yang dibuat untuk mengubah data-data keuangan ke dalam bentuk yang bermanfaat bagi pengguna dan berguna bagi pemakainya. Zare (2012) juga mengungkapkan SIA sebagai komponen dan elemen dari suatu organisasi yang menyediakan informasi bagi pengguna dengan pengolahan peristiwa keuangan.

Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah

Sistem Informasi Akuntansi pada sektor publik atau sektor pemerintah yang kemudian di kenal dengan Sistem Informasi Akuntansi Pemerintah (SIAP) merupakan kumpulan komponen/elemen dari suatu organisasi pemerintah yang mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data keuangan pemerintah untuk menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan

keputusan. Dalam pemerintah pusat istilah SIAP lebih dikenal dengan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat (SAPP).

SAPP merupakan rangkaian sistemik dari prosedur-prosedur (seperti prosedur pembayaran), penyelenggara (seperti penyusun laporan keuangan, pereview laporan keuangan), peralatan (seperti aplikasi yang digunakan SAKTI, SPAN maupun e-rekon LK), serta elemen lain (seperti bagan akun standar maupun kebijakan akuntansi) untuk mewujudkan fungsi akuntansi dari sejak pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Pemerintah Pusat" (PMK No.215, 2016). Adapun diantara sistem teknologi informasi yang digunakan dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat adalah Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dan Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI). SPAN dan SAKTI.

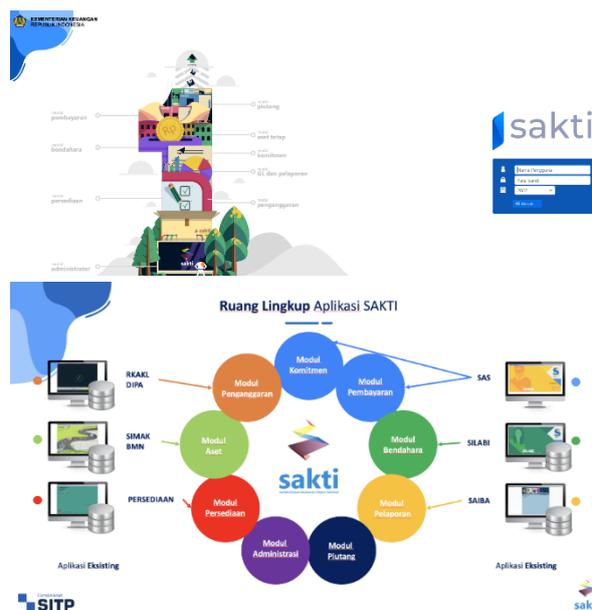
Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, SAKTI adalah sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara (PMK No. 159, 2018).

SAKTI merupakan sistem aplikasi yang mengintegrasikan seluruh aplikasi satuan kerja yang ada. SAKTI mempunyai fungsi utama perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, SAKTI terdiri dari beberapa modul (menu), yaitu modul administrasi, penganggaran, komitmen, bendahara, pembayaran, persediaan, aset tetap, piutang, dan modul general ledger dan pelaporan (GLP). Selain itu, SAKTI juga menerapkan konsep *single database* dan ber-interface dengan SPAN pada setiap tahap siklus anggaran.

Tampilan depan dan ruang lingkup aplikasi SAKTI dapat dilihat pada gambar 1.

Gambar 1. Tampilan Depan dan Ruang Lingkup Aplikasi SAKTI



Fitur yang ada pada aplikasi SAKTI yaitu *Integrasi Database, Single Entry Point, Multi User Multi Satker, Level User (Maker, Checker, dan Approver),* penerapan *Access Control List (ACL),* kompatibilitas dengan SPAN, basis akuntansi akrual secara Transaksional, *Open-Closing Period, Locking Transaksi,* terdapat 14 Periode Akuntansi (*Unaudited dan Audited*), *ADK Interface (Encrypted, Hashed, PIN)* dan *Historical dan Log Data.*

Modul General Ledger dan Pelaporan (GLP) SAKTI

Modul General Ledger dan Pelaporan (GLP) merupakan modul Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang memuat keseluruhan proses yang terkait dengan akuntansi dan pelaporan (DJPB, 2022a). Modul GLP terhubung dengan modul lainnya dalam SAKTI dan SPAN. Dalam Modul GLP juga akan terlihat jurnal yang terbentuk baik yang berasal dari modul GLP sendiri yang berupa jurnal penyesuaian dan jurnal manual maupun jurnal yang terbentuk di setiap transaksi yang dihasilkan oleh modul lain.

Modul GLP akan melakukan validasi dan mem-*posting* jurnal yang terbentuk dan menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca. Adapun untuk satuan kerja yang mempunyai status sebagai Badan Layanan Umum (BLU) juga terdapat Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan

Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL).

Modul GLP menerapkan konsep dua *ledger* yang meliputi *accrual ledger* untuk membukukan transaksi-transaksi berbasis akrual dan *cash ledger* untuk membukukan transaksi berbasis kas. Fungsi Modul GLP, di antaranya:

1. Membuat jurnal yang di-trigger oleh transaksi yang dihasilkan oleh modul lain (subledger);
2. Membuat penyesuaian dan jurnal yang tidak dihasilkan modul lain;
3. Mem-posting jurnal dalam rangka pembentukan laporan;
4. Tutup periode;
5. Membuat laporan keuangan sebagai bahan untuk pertanggungjawaban; dan
6. Rekonsiliasi dan konsolidasi.

Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN)

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 278/PMK.05/2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan

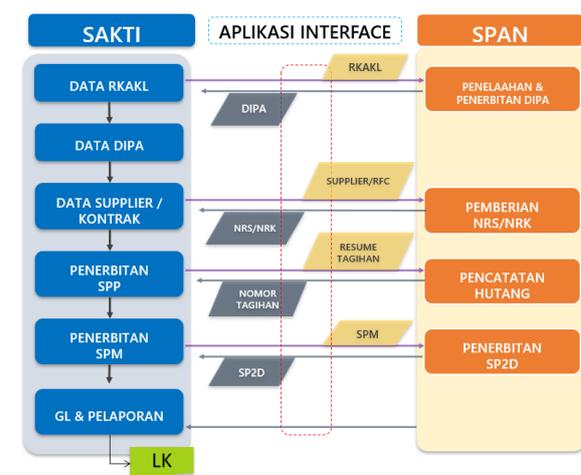
Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat SPAN adalah sistem terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan APBN yang meliputi modul penganggaran, modul komitmen, modul pembayaran, modul penerimaan, modul kas, dan modul akuntansi dan pelaporan (PMK No. 154/PMK.05/2014, 2014).

Sementara menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI, Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara yang selanjutnya disingkat SPAN adalah sistem terintegrasi seluruh proses yang terkait dengan pengelolaan anggaran yang meliputi penyusunan anggaran, manajemen dokumen anggaran, manajemen supplier, manajemen komitmen pengadaan barang dan jasa, manajemen pembayaran, manajemen penerimaan negara, manajemen kas,

akuntansi, dan pelaporan (PMK No. 171/PMK.05/2021, 2021).

Dalam aplikasi SPAN juga terdiri atas modul-modul (menu) seperti halnya aplikasi SAKTI, yaitu modul penganggaran, komitmen, pembayaran, penerimaan, kas dan modul akuntansi dan pelaporan atau modul general ledger dan pelaporan (GLP). Gambaran interkoneksi SAKTI dan SPAN dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2. Interkoneksi SAKTI - SPAN



Modul General Ledger dan Pelaporan (GLP) SPAN

Modul GLP SPAN merupakan inti dari sistem pengelolaan keuangan negara yang terintegrasi. Hal ini dikarenakan seluruh transaksi keuangan yang di-input ke dalam sistem akan di-posting

seluruhnya ke dalam modul GLP, sehingga modul GLP merupakan sumber data bagi penyusunan laporan keuangan pemerintah. Pada SPAN, modul GLP juga menerapkan dua *general ledger*, yaitu *general ledger akrual* dan *general ledger kas* untuk mengakomodir penerapan penganggaran berbasis kas dan penerapan akuntansi akrual.

Terkait penyusunan laporan keuangan, pada Modul GLP juga dapat dilakukan pembuatan jurnal manual dan jurnal pembalik serta melihat informasi jurnal dan informasi perkiraan atas akun yang sudah tercatat dalam *general ledger*.

Dalam rangka menghasilkan laporan keuangan, *operator* Modul GLP hanya perlu membuat permintaan pada sistem aplikasi SPAN untuk memperoleh berbagai laporan keuangan yang diinginkan. Adapun laporan keuangan yang dihasilkan oleh Modul GLP pada SPAN yaitu Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Laporan

Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Laporan Arus Kas (LAK).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui metode studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Adapun data yang diperoleh berupa data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan mendatangi langsung objek penelitian untuk melakukan observasi dan wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur yang relevan dengan topik.

PEMBAHASAN

Penerapan Sistem Aplikasi SAKTI dan SPAN dalam Penyusunan Laporan Keuangan di KPPN Pontianak

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) memiliki tugas untuk melakukan penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Adapun Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang memiliki tugas dalam melakukan penyusunan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Hal ini dikarenakan, Kementerian Keuangan selaku BUN mempunyai peran sebagai *Chief Financial Officer* (CFO) dan juga *Chief Operational Officer* (COO) sehingga institusi yang dipimpinnya juga sebagai entitas akuntansi dan entitas pelaporan, dimana entitas pelaporan memiliki tugas untuk mengkonsolidasikan seluruh laporan keuangan yang telah disusun oleh entitas akuntansi dalam hal ini adalah Kementerian Negara/Lembaga.

Proses penyusunan laporan keuangan pemerintah dilakukan melalui sistem aplikasi yang terintegrasi, yaitu melalui sistem aplikasi SPAN yang digunakan oleh Kementerian Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk

menghasilkan laporan keuangan BUN (LK BUN) dan sistem aplikasi SAKTI yang digunakan oleh Kementerian Negara/Lembaga untuk menghasilkan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL). LK BUN dan LKKL yang dihasilkan nantinya akan dikonsolidasikan oleh Kementerian Keuangan untuk menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP). Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

KPPN Pontianak sebagai instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan Republik Indonesia melaksanakan dua fungsi dalam pengelolaan keuangan negara yang menyebabkan KPPN Pontianak harus menyusun dua jenis laporan keuangan, yaitu laporan keuangan

sebagai satuan kerja dan laporan keuangan sebagai kuasa BUN. Adapun sebagai satuan kerja, laporan keuangan yang disusun KPPN Pontianak terdiri dari Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Sedangkan sebagai Kuasa BUN, laporan keuangan yang disusun KPPN Pontianak meliputi semua laporan keuangan yang disusun sebagai satuan kerja setelah dilakukan proses konsolidasi ditambah dengan Laporan Arus Kas (LAK) dan Laporan Perubahan SAL (LP SAL).

Penyusunan laporan keuangan di KPPN Pontianak dilakukan dengan menggunakan sistem aplikasi SAKTI untuk menghasilkan laporan keuangan Satker dan sistem aplikasi SPAN untuk menghasilkan laporan keuangan BUN. Dalam proses penyusunannya, KPPN Pontianak menggunakan modul GLP yang terdapat dalam sistem aplikasi SAKTI dan SPAN. Adapun data terkait penyusunan laporan keuangan di modul GLP pada sistem aplikasi SAKTI dan

SPAN di-*feeder* secara otomatis dari modul-modul keuangan lainnya dan dari jurnal manual dan penyesuaian yang direkam pada Modul GLP.

Secara umum, alur penyusunan laporan keuangan di KPPN Pontianak dimulai dari *input* formulir dokumen sumber berupa saldo awal, dokumen anggaran, dokumen transaksi tahun berjalan, dokumen pengesahan, dokumen transaksi akrual, dan dokumen transaksi lainnya ke dalam modul-modul keuangan yang ada pada sistem aplikasi SAKTI dan SPAN yang nantinya dari data tersebut akan terbentuk jurnal berbasis akrual dan jurnal berbasis kas. Dari kedua jurnal ini, selanjutnya akan dilakukan *posting* ke dalam masing-masing buku besar, yaitu *accrual ledger* dan *cash ledger* untuk selanjutnya dihasilkan neraca percobaan setelah terlebih dahulu dilakukan penyesuaian pada transaksi di *accrual ledger*. Neraca percobaan inilah yang akan menjadi *input* untuk menghasilkan laporan keuangan KPPN Pontianak baik sebagai satuan kerja maupun sebagai kuasa BUN.

Adapun proses penyusunan laporan keuangan di KPPN Pontianak pada setiap sistem aplikasi SAKTI dan SPAN adalah sebagai berikut:

Penyusunan Laporan Keuangan pada Aplikasi SAKTI

Peralihan penggunaan SAKTI *full module* dari sebelumnya menggunakan aplikasi *existing* dalam rangka digitalisasi pengelolaan keuangan negara mengharuskan migrasi data dari setiap aplikasi *existing* ke dalam sistem aplikasi SAKTI. Proses migrasi data ini hanya dilakukan sekali pada saat pertama kali menggunakan sistem aplikasi SAKTI (migrasi data saat ini bisa langsung diperoleh dari aplikasi e-rekon LK). Adapun data yang dimigrasi meliputi saldo awal neraca yang diperoleh dari aplikasi *existing* yaitu Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA), saldo awal akun persediaan yang diperoleh dari aplikasi persediaan, dan saldo awal Barang Milik Negara (BMN) aset tetap/aset tidak berwujud yang diperoleh dari Sistem Informasi Manajemen dan

Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN), Adapun proses migrasi saldo neraca dimulai dengan memindahkan ADK migrasi neraca dari aplikasi SAIBA ke dalam *database* SAKTI.

Setelah dilakukan migrasi data saldo awal, proses selanjutnya adalah perekaman jurnal transaksi dan jurnal manual dan penyesuaian khusus. Perekaman jurnal manual dan penyesuaian khusus dapat dilakukan pada modul GLP apabila terdapat transaksi yang membutuhkan penyesuaian atau terdapat transaksi yang belum terekam pada modul keuangan lainnya pada sistem aplikasi SAKTI. Sedangkan untuk jurnal transaksi akan terbentuk secara otomatis setiap telah dilakukannya pencatatan dokumen sumber ke dalam modul penganggaran, modul komitmen, modul bendahara, modul pembayaran, modul persediaan, dan modul aset tetap.

Modul GLP Aplikasi SAKTI

Modul General Ledger dan Pelaporan (GLP) merupakan modul yang berperan dalam menghimpun seluruh

data laporan keuangan dari modul keuangan lainnya pada sistem aplikasi SAKTI untuk selanjutnya dilakukan penyusunan laporan keuangan. Hal ini dikarenakan seluruh transaksi yang di *input*-kan pada setiap modul keuangan dalam sistem aplikasi SAKTI akan bermuara pada Modul GLP. Dalam menjalankan proses bisnisnya, Modul GLP terdiri dari enam menu, yaitu menu proses, tutup buku, laporan, laporan BLU, likuidasi satker, dan transaksi resiprokal. Akan tetapi, dalam rangka penyusunan laporan keuangan pada sistem aplikasi SAKTI hanya melibatkan menu proses, tutup buku, dan laporan.

Tahapan penyusunan laporan keuangan pada sistem aplikasi SAKTI adalah sebagai berikut:

1. Tahap pertama adalah dengan melakukan migrasi data saldo neraca melalui sub menu migrasi data.
2. Tahap kedua adalah dengan melakukan pembuatan jurnal manual. Pembuatan jurnal manual hanya akan dilakukan apabila terdapat transaksi yang belum terekam pada modul

lainnya. Selain jurnal manual terdapat juga jurnal penyesuaian.

3. Tahap ketiga terdapat pada sub menu validasi jurnal. Pada sub menu ini akan dilakukan validasi atas *input* data jurnal yang berasal dari modul lainnya pada sistem aplikasi SAKTI
4. Tahap keempat adalah dengan melakukan *posting* atas jurnal yang telah divalidasi. Proses ini akan menghasilkan neraca saldo dan neraca percobaan yang nantinya akan menjadi data sumber dalam penyusunan laporan keuangan. Sama seperti pada proses validasi, proses *posting* jurnal *default*-nya juga terotomasi secara terjadwal, tetapi pengguna (*user*) tetap dapat melakukan *posting* jurnal secara mandiri.
5. Tahap kelima terdapat pada sub menu *monitoring* jurnal. *Monitoring* jurnal berguna untuk memastikan bahwa data jurnal sudah dilakukan proses validasi dan *posting*.

Setelah dilakukan migrasi data, jurnal manual, validasi jurnal, *posting*

jurnal, *monitoring* jurnal, dan jurnal penyesuaian khusus, langkah selanjutnya adalah dengan melakukan tutup buku melalui menu tutup buku. Pada setiap akhir periode akuntansi dan pelaporan, pengguna (*user*) modul GLP akan melakukan tutup buku untuk menutup seluruh transaksi pada periode bersangkutan termasuk kegiatan transaksi dari modul keuangan lainnya pada sistem aplikasi SAKTI. Hal ini bertujuan agar modul keuangan lainnya pada sistem aplikasi SAKTI tidak bisa menambah transaksi/jurnal baru untuk periode yang sudah ditutup.

Terdapat dua jenis tutup buku, yaitu tutup buku sementara dan tutup buku permanen. Tutup buku sementara adalah proses tutup buku yang dilakukan pada setiap bulannya dan masih memungkinkan untuk dilakukan buka periode kembali. Proses tutup buku sementara akan memindahkan saldo neraca percobaan pada periode yang ditutup ke neraca percobaan awal bulan periode selanjutnya dan mengirimkan data rekonsiliasi bulanan untuk

keperluan interkoneksi rekonsiliasi SAKTI dengan E-Rekon LK. Sedangkan tutup buku permanen adalah tutup buku yang bersifat *final* dan tidak dapat dilakukan proses buka periode kembali. Tutup buku permanen biasanya dilakukan pada saat penyusunan laporan keuangan telah selesai, yaitu pada akhir tahun anggaran.

Selanjutnya, langkah yang terakhir adalah dengan mengakses menu pelaporan yang juga merupakan menu terakhir dalam penyusunan laporan keuangan pada sistem aplikasi SAKTI. Pada menu ini, pengguna (*user*) dapat menampilkan dan mengunduh berbagai laporan keuangan berdasarkan periode buku tertentu yang diinginkan. Di KPPN Pontianak, laporan keuangan yang dihasilkan oleh modul GLP pada aplikasi SAKTI adalah laporan keuangan tingkat satuan kerja.

Adapun laporan keuangan yang dihasilkan pada KPPN Pontianak meliputi laporan keuangan berbasis akrual dan laporan keuangan berbasis kas. Laporan keuangan berbasis akrual

berisikan Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Neraca. Sementara laporan keuangan berbasis kas berisikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Realisasi Belanja, Laporan Pengembalian Belanja, Laporan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah, dan Laporan Realisasi Pengembalian Pendapatan Negara dan Hibah.

Penyusunan Laporan Keuangan pada Aplikasi SPAN

Penerapan *single database* pada SPAN mengakibatkan perlu dilakukannya proses konversi dan migrasi data saldo neraca akhir tahun sebelum SPAN dilaksanakan dan data transaksi harian dari sistem *legacy* (sistem yang digunakan sebelumnya) pada tahun implementasi SPAN ke dalam *database* sistem aplikasi SPAN. Proses konversi data tersebut bernama *GL open* yang merupakan bagian dari rangkaian tahap awal proses implementasi sistem aplikasi SPAN di Indonesia. Proses *GL open* ini penting untuk mempersiapkan saldo

awal neraca tahun dimulainya implementasi sistem aplikasi SPAN sebagai dasar penyusunan laporan keuangan yang terintegrasi terpusat.

Setiap awal periode akuntansi, pada sistem aplikasi SPAN akan dilakukan penyesuaian saldo awal melalui proses penyesuaian saldo pos-pos tertentu dalam neraca, yaitu pos Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas dalam Transito, dan Utang pada Pihak Ketiga. Penyesuaian ini diperlukan karena neraca KPPN secara historis merupakan neraca kas umum negara yang masih menyajikan saldo-saldo kas satuan kerja dan utang pihak ketiga. Oleh karena itu, perlu dilakukannya penyesuaian pada saldo pos-pos neraca tersebut agar mencerminkan nilai yang sebenarnya pada akhir periode atau awal periode akuntansi.

Setelah mempersiapkan data saldo awal neraca, pada SPAN proses penyusunan laporan keuangan yang terintegrasi terpusat didukung oleh adanya Bagan Akun Standar (BAS) yang menghubungkan setiap modul keuangan

dalam sistem aplikasi SPAN dengan akun-akun melalui terbentuknya jurnal-jurnal transaksi ketika dilakukan proses input data ke dalam tiap-tiap modul keuangan tersebut. Adapun data jurnal transaksi yang dihasilkan pada sistem aplikasi SPAN berasal dari transaksi pada sistem aplikasi SAKTI yang sudah dilakukan proses validasi jurnal dan dari transaksi pada setiap modul keuangan dalam sistem aplikasi SPAN yang meliputi *Management of Spending Authority (MoSA)*, *Budget Commitment (BC)*, *Cash Management (CM)*, *Payment Management (PM)*, *Government Receipt (GR)*, dan *General Ledger (GL)*. Meskipun berperan dalam menghasilkan laporan keuangan, modul GLP juga turut menghasilkan jurnal transaksi pada saat dilakukannya pembuatan jurnal manual jika terdapat transaksi yang membutuhkan penyesuaian atau belum terekam dalam modul keuangan lainnya.

Modul GLP Aplikasi SPAN

Pada SPAN, Modul General Ledger dan Pelaporan (GLP) merupakan inti dari

pengelolaan keuangan negara yang terintegrasi terpusat dikarenakan seluruh data dokumen sumber yang di-*input*-kan ke dalam sistem aplikasi SPAN akan ter-*posting* ke dalam Modul GLP untuk selanjutnya digunakan sebagai sumber data dalam penyusunan laporan keuangan. Adapun dalam menjalankan proses bisnisnya, Modul GLP dioperasikan oleh *staff* Vera pada Seksi Verifikasi dan Akuntansi, dan terdiri dari dua sub modul, yaitu GL Vera User dan GL View. Kegiatan yang dilakukan pada Modul GLP meliputi pemutakhiran data BAS, konversi data transaksi keuangan, koreksi data transaksi keuangan, penyesuaian sisa pagu, jurnal penyesuaian, rekonsiliasi data, dan laporan keuangan. Tahapan penyusunan laporan keuangan pada sistem aplikasi SPAN adalah sebagai berikut:

1. Langkah pertama dalam penyusunan laporan keuangan pada Modul GLP dalam sistem aplikasi SPAN adalah dengan melakukan pemutakhiran data BAS. Seperti yang sudah dijelaskan pada subbab sebelumnya,

- pemutakhiran data BAS penting untuk dilakukan agar memudahkan dalam penjurnalan transaksi yang terjadi pada setiap modul keuangan dalam sistem aplikasi SPAN. Pemutakhiran data BAS dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) berdasarkan usulan pemutakhiran dan penetapan kebijakan.
- Langkah selanjutnya adalah melakukan konversi data transaksi keuangan. Proses konversi data transaksi keuangan meliputi konversi data saldo awal, data transaksi harian, dan data yang dihasilkan pada sistem aplikasi SPAN. Konversi data saldo awal dan data transaksi harian dilakukan pada tahap awal implementasi sistem aplikasi SPAN sebagai dasar pembentukan data awal saldo neraca. Sedangkan konversi data yang dihasilkan dari sistem aplikasi SPAN berasal dari data transaksi yang di-*input*-kan ke dalam modul-modul keuangan yang terdapat dalam sistem aplikasi SPAN dan data transaksi dari sistem aplikasi SAKTI yang sudah dilakukan proses validasi jurnal.
 - proses pembuatan jurnal manual dan jurnal pembalik atas kegiatan koreksi data transaksi keuangan, penyesuaian sisa pagu, dan jurnal penyesuaian dalam Modul GLP. Terkait koreksi data transaksi keuangan, proses koreksi dilakukan atas data transaksi pengeluaran dan data transaksi penerimaan. Koreksi dapat dilakukan dengan atau tanpa adanya permintaan dari satuan kerja/pihak terkait apabila menurut ketentuan dan *post audit* harus dilakukan koreksi. Selanjutnya adalah proses penyesuaian sisa pagu yang dilakukan setelah memperoleh surat permintaan penyesuaian sisa pagu DIPA dari satuan kerja. *Staff Vera* dapat melihat informasi dana tersedia untuk mengetahui informasi nilai anggaran awal, anggaran yang sudah dicadangkan, realisasi atas anggaran, dan sisa pagu anggaran (dana tersedia). Terakhir adalah pembuatan

- jurnal penyesuaian melalui *input* data ADK jurnal penyesuaian semesteran dan tahunan yang diperoleh dari satuan kerja ke dalam sistem aplikasi SPAN.
4. Setelah dilakukan pembuatan jurnal manual dan jurnal pembalik pada Modul GLP, langkah selanjutnya adalah melakukan *posting* atas seluruh jurnal transaksi yang telah terbentuk pada setiap modul keuangan dalam sistem aplikasi SPAN ke dalam *general ledger*. Dari proses *posting* jurnal, akan dihasilkan *summary* berupa neraca saldo dan neraca percobaan yang nantinya akan digunakan sebagai sumber data dalam penyusunan laporan keuangan. Jurnal yang sudah di-*posting* dalam sistem aplikasi SPAN tidak dapat dilakukan proses penghapusan, tetapi masih bisa di-*reverse* melalui proses pembuatan jurnal pembalik.
 5. Setelah proses *posting* jurnal, langkah selanjutnya adalah melihat informasi jurnal dan melihat informasi perkiraan. Melihat informasi jurnal merupakan proses untuk melihat secara detail informasi jurnal yang sudah dilakukan *posting* baik secara *batch* maupun individual. Sedangkan melihat informasi perkiraan merupakan proses untuk dapat melihat *summary* atas akun yang sudah tercatat dalam *general ledger*.
 6. Langkah selanjutnya adalah rekonsiliasi data *general ledger* yang berada pada satuan kerja dalam sistem aplikasi SAKTI dan KPPN dalam sistem aplikasi SPAN. Dari proses rekonsiliasi akan dihasilkan Berita Acara Rekonsiliasi (BAR). Adapun data yang dilakukan rekonsiliasi meliputi pagu belanja, belanja, pengembalian belanja, pagu transfer, transfer, pengembalian transfer, estimasi pendapatan pajak, estimasi pendapatan bukan pajak, pendapatan pajak, pendapatan bukan pajak, pengembalian pendapatan bukan pajak, pengembalian pendapatan pajak imbalan bunga, mutasi uang persediaan, kas di
-

bendahara pengeluaran, kas pada yang sudah tersedia.

BLU, dan kas lainnya di K/L dari hibah.

- Langkah yang terakhir adalah penarikan data laporan keuangan tingkat Kuasa BUN dari sistem aplikasi SPAN. *Staff* Vera dapat menarik data laporan keuangan yang diinginkan dari *database* sistem aplikasi SPAN, tetapi tidak semua data laporan keuangan langsung terbentuk pada hari dilakukannya penarikan data dikarenakan ada data laporan keuangan tertentu keluar pada keesokan harinya setelah dilakukannya penarikan data.

Adapun laporan keuangan yang dihasilkan KPPN Pontianak selaku Kuasa BUN meliputi Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), Neraca, dan Laporan Arus Kas (LAK). Sedangkan untuk Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK), penyusunannya dilakukan secara manual oleh *staff* Vera sesuai dengan *template*

Laporan keuangan tingkat Kuasa BUN yang dihasilkan di KPPN Pontianak selanjutnya akan dilakukan analisis laporan keuangan oleh *staff* Vera sebelum diserahkan ke tim penilai untuk dilakukan penilaian. Adapun tim penilai di KPPN Pontianak terdiri dari Kepala Seksi Bank dan Kepala Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal. Setelah dilakukan penilaian, selanjutnya laporan keuangan diserahkan ke Kantor Wilayah DJPb untuk dihasilkan laporan keuangan tingkat Kanwil. Laporan keuangan tingkat Kanwil yang sudah dihasilkan selanjutnya akan diteruskan ke Kantor Pusat untuk nantinya dilakukan penyusunan Laporan Keuangan tingkat Bendahara Umum Negara (LK BUN).

Kendala dalam Penyusunan Laporan Keuangan pada SAKTI dan SPAN

SAKTI dan SPAN merupakan wujud dari adanya inovasi baru dalam dunia pemerintahan terutama pada bidang keuangan negara melalui proses digitalisasi sistem pengelolaan keuangan

negara di Indonesia. Sebagai sistem aplikasi yang terintegrasi, SAKTI dan SPAN menjadi bukti keberhasilan Indonesia dalam menerapkan *Integrated Financial Management Information System* (IFMIS) sebagai bagian dari pelaksanaan transformasi menuju *e-government*. Kedua sistem aplikasi tersebut merupakan proyek besar Kementerian Keuangan yang pengembangannya dilakukan bersama antara Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Anggaran, dan Pusat Informasi dan Teknologi (Pusintek) Sekretariat Jenderal.

Luasnya cakupan wilayah operasional SAKTI dan SPAN, menjadi tantangan tersendiri bagi tim pengembang untuk mempersiapkan sistem aplikasi SAKTI dan SPAN yang dapat diterapkan pada seluruh instansi pemerintah di Indonesia. Sebelum diimplementasikan dalam dunia pemerintahan, sistem aplikasi SAKTI dan SPAN sudah dilakukan uji coba terlebih dahulu melalui penerapan bertahap pada instansi-instansi pemerintah di lingkungan Kementerian Keuangan

untuk meminimalisasi terjadinya gagal sistem jika sudah diaplikasikan nantinya. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala-kendala yang dihadapi pengguna (*user*) baik karena belum siapnya pengguna (*user*) untuk mengoperasikan SAKTI dan SPAN atau karena sistem aplikasi SAKTI dan SPAN yang masih perlu dilakukan perkembangan secara terus-menerus dalam rangka penyempurnaan proses bisnis.

Terkait penyusunan laporan keuangan pemerintah, kehadiran sistem aplikasi SAKTI dan SPAN sangat membantu dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas melalui penyederhanaan proses bisnis yang sudah terotomatisasi dan penerapan *single database*. Penelitian kuantitatif terkait implementasi aplikasi SPAN dapat merujuk pada penelitian Kukuh Widdo & Sumiyana (2012), Sarmilasari (2016) dan Wibowo, dkk (2018) sedangkan penelitian terkait implementasi SAKTI dapat merujuk kepada penelitian yang telah dilakukan

oleh Prabowo (2017), Pambudi (2018), Amriani & Iskandar (2019) dan At-tamimi dan Siregar (2021).

Sebelum adanya SAKTI dan SPAN, proses input dokumen transaksi dilakukan secara manual pada aplikasi SAIBA yang berbasis desktop dan tidak menerapkan *single database* sehingga terdapat kemungkinan terjadinya kesalahan *input* atau *human error*. Namun, kelebihan dan kemudahan yang ditawarkan oleh sistem aplikasi SAKTI dan SPAN ternyata juga diikuti dengan masih adanya kekurangan dalam kedua sistem aplikasi tersebut.

Pada sistem aplikasi SAKTI, kemungkinan untuk terjadinya kendala dalam pengoperasian sebenarnya sangat kecil mengingat sistem aplikasi SAKTI yang sudah *user friendly* dan mengalami banyak uji coba sebelum diimplementasikan, hanya saja pada beberapa instansi pemerintah hal tersebut belum didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai seperti komputer yang belum memenuhi spesifikasi sehingga biasanya terjadi

kendala berupa *lagging*. Biasanya juga ada suatu waktu sistem aplikasi SAKTI tidak dapat dioperasikan karena adanya *maintenance* sehingga menyebabkan pekerjaan pada hari tersebut terganggu. Namun, tim pengembang SAKTI sudah merespon hal tersebut dengan memberikan *broadcast* atau pemberitahuan apabila akan dilakukannya *maintenance* sehingga pengguna (*user*) sistem aplikasi SAKTI tidak mengalami kebingungan apabila sistem aplikasi SAKTI tidak dapat dijalankan.

Sementara pada sistem aplikasi SPAN, kendala utama terjadi pada proses pengoperasian SPAN yang membutuhkan waktu cukup lama mengingat SPAN merupakan *big data* yang menyimpan data keuangan seluruh instansi pemerintah di Indonesia sehingga sering terjadi *lagging*. Terkait penyusunan laporan keuangan, pada sistem aplikasi SPAN juga terdapat kendala di mana ada beberapa data seperti neraca tingkat Kantor Wilayah dan KPPN yang jika datanya ditarik pada

hari tersebut baru akan keluar di keesokan harinya. Oleh karena itu, pengguna (*user*) Modul GLP SPAN harus mampu memperkirakan waktu untuk melakukan penarikan data dari sistem aplikasi SPAN agar terhindar dari keterlambatan dalam proses penyerahan laporan keuangan.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat diambil beberapa kesimpulan bahwa:

1. Proses penyusunan laporan keuangan di KPPN Pontianak baik laporan keuangan sebagai satuan kerja pada sistem aplikasi SAKTI maupun laporan keuangan sebagai kuasa BUN pada sistem aplikasi SPAN sudah sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang ada. Proses bisnis GLP SAKTI maupun SPAN yang dijalankan di KPPN Pontianak sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
2. Kendala utama dan sering terjadi

dalam proses penyusunan laporan keuangan di KPPN Pontianak baik pada sistem aplikasi SAKTI dan SPAN adalah sistem yang mengalami *lagging*. Hal ini dikarenakan banyaknya transaksi yang diproses di setiap harinya, disamping itu terdapat sarana serta prasarana pendukung yang digunakan belum memadai. Kendala lainnya adalah pada sistem aplikasi SAKTI biasanya dilakukan perbaikan/*maintenance* yang mengakibatkan pekerjaan menjadi terhambat.

SARAN

Berdasarkan kendala-kendala yang terdapat dalam proses penyusunan laporan keuangan di KPPN Pontianak baik pada sistem aplikasi SAKTI maupun sistem aplikasi SPAN, ada beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk perbaikan ke depannya, di antaranya:

1. Perbaikan hendaknya terus-menerus dilakukan sehingga sistem aplikasi SAKTI dan SPAN dapat berjalan

sesuai dengan yang diharapkan pengguna (menjadi lebih ringan dan dapat meminimalisir lagging), disamping itu penjadwalan maintenance dilakukan secara berkala dan mempertimbangkan (menghindari) pada tanggal atau periode penyusunan laporan keuangan.

2. Perlunya pemutakhiran sarana dan prasarana yang digunakan dalam proses penyusunan laporan keuangan misalnya *upgrade* perangkat computer atau laptop dengan spesifikasi yang lebih tinggi dan pemeliharaan jaringan wifi yang stabil.

DAFTAR PUSTAKA

- At-tamimi, R. M. R., & Siregar, T. E. (2021). Measurement of Successful Implementation of Institution Level Financial Application System (SAKTI) Web Full Module with DeLone and McLean Information System Success Model Approach. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(4), 10098–10107.
- Bodnar, G. H., & Hopwood, W. S. (2010). Sistem Informasi Akuntansi. In *Jakarta: Salemba Empat*.
- DJPB, K. K. R. (2020). *MENGENAL SAKTI*.
- DJPB, K. K. R. (2022a). *Modul Sakti*. <https://Djpb.Kemenkeu.Go.Id/Kppn/Pacitan/Id/Sakti/Modul-Sakri.Html>.
- DJPB, K. K. R. (2022b). *Panduan Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat instansi (SAKTI)*. <https://Djpb.Kemenkeu.Go.Id/Kppn/Bandung2/Id/Data-Publikasi/Berita-Terbaru/2843-Sakti.Html>.
- Inpres. (2003). *Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government*.
- Kukuh Widodo, & Sumiyana. (2012). *ANALISIS KEBERTERIMAAN INISIAL SISTEM PERBENDAHARAAN DAN ANGGARAN NEGARA (SPAN) Studi pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara*.
- PMK No. 159. (2018). *Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi*.
- PMK No.215. (2016). *Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat*.
- PMK Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara, Pub. L. No. PMK 154/PMK.05/2014 (2014).

PMK No. 171/PMK.05/2021, Pub. L. No.
PMK No. 171/PMK.05/2021 (2021).

Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2016).
Sistem Informasi Akuntansi.

Sarmilasari, M. (2016). Sikap dan
kepuasan pengguna sistem
perbendaharaan dan anggaran
negara (SPAN). *Indonesian Treasury
Review: Jurnal Perbendaharaan,
Keuangan Negara Dan Kebijakan
Publik*, 1(2), 15–33.

Sudarto, S. (2019). Pengembangan
integrated financial management
information system (IFMIS) di
Indonesia. *Indonesian Treasury
Review: Jurnal Perbendaharaan,
Keuangan Negara Dan Kebijakan
Publik*, 4(2), 87–103.

Wibowo, D. P., Rosidi, R., & Purwanti, L.
(2018). Determinan Kepuasan Sistem
Perbendaharaan Dan Anggaran
Negara (Studi Pada Direktorat
Jenderal Perbendaharaan). *Jurnal
Akuntansi Aktual*, 5(2), 108–120.

Zare, I. (2012). Study of Effect of
Accounting Information Systems
and Software's on Qualitative
Features of Accounting Information.
*International Journal of Management
Sciences and Business Research*.